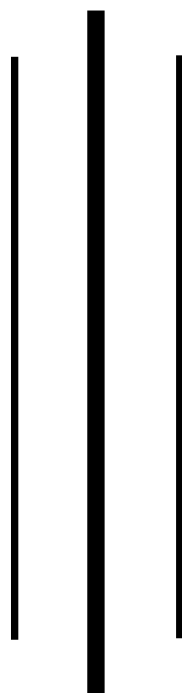




**LAPORAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Malang secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka telah diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun anggaran. Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan RidhoNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 ini dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 merupakan wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di amatkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Maksud dan Tujuan Lapotan ini untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019.

Tentu saja dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu diharapkan saran dari pihak-pihak yang berkompeten untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tahun-tahun yang akan datang.

Kepanjen, Februari 2020

**KEPADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG**
DINAS
TENAGA KERJA
Drs. YOYOK WARDOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 201503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang yang ingin dicapai melalui Visi Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah *Terwujudnya Tenaga Kerja yang Mandiri, Produktif, Berdaya Saing Serta Sejahtera*. Dengan tujuan untuk :

1. Penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang.
2. Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang yang ditempatkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
3. Besaran penempatan transmigrasi dari Kabupaten Malang ke daerah transmigrasi sebagai wujud memenuhi keberhasilan program transmigrasi dalam pemerataan dan pemekaran wilayah di Indonesia.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

Visi disusun untuk mewujudkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global dalam pasar kerja, kondisi lingkungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang baik, harmonis dan dinamis dengan saling menghormati hak-hak masing-masing, serta kondisi kesejahteraan pekerja yang semakin meningkat dan perusahaan lebih produktif, penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan kompetensi, serta penataan persebaran penduduk. Tiga misi yang ditetapkan merupakan acuan dalam menyusun kebijakan, tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Pada tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, program yang dilaksanakan adalah :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;

- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;
 - l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, dengan kegiatan:
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dengan kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5. *Program Perluasan dan Penempatan Kerja* dijabarkan dengan kegiatan:
- a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
6. *Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja*, dijabarkan dengan kegiatan:
- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dengan kegiatan:
- a. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
8. *Program Pembinaan Lingkungan Sosial* dijabarkan dengan kegiatan:
- a. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
 - b. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- c. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

9. *Program Ketrasmigrasian*, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
- b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM;
- c. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
- d. Pelatihan Transmigrasi Lokal

Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja ditahun 2019 Rp.10.659.442.021 terealisasi sebesar Rp.9.075.531.213. Demikian LKj Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Capaian Kinerja Tahun 2018	8
D. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
1. Tujuan dan Sasaran	16
2. Kebijakan dan Program	17
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Capaian Kinerja	22
1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019	22
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018	23
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	24
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	25
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	31
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	32
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
B. Realisasi Anggaran	34
C. Prestasi Tahun 2019	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
– Matriks Renstra 2016-2021	
– Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
– Rencana Kinerja Tahun 2019	
– Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Malang	1
Tabel 1.2 Capaian kinerja Dinas Tahun 2018	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	24
Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	32
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2019	34
Tabel 3.8 Prestasi Tahun 2019	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang perlu didorong agar lebih berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas bagi kelompok setengah pengangguran dan pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang

NO	URIAN KETENAGA KERJAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		L	P	JML	L	P	JML
1	Penduduk Usia Kerja	1.005.921	1.002.142	2.008.063	924.718	891.008	1.815.726
2	Angkatan Kerja	858.846	540.764	1.399.610	861.095	556.468	1.417.563
	– Bekerja	831.331	522.980	1.354.311	826.650	536.807	1.363.457
	– Pengangguran	27.515	17.784	45.299	34.445	19.661	54.106
3	Bukan Angkatan Kerja	147.075	461.378	608.453	154.192	454.477	608.669
	– Sekolah	63.192	79.818	143.010	70.880	60.672	131.552
	– Mengurus Rumah Tangga	36.953	358.953	395.906	25.731	357.064	382.795
	– Lainnya	46.930	22.607	69.537	57.581	36.741	94.322
4	TPAK	85,37%	53,92%	69,69%	83,03%	54,06%	68,60%
5	TPT	3,20%	3,28%	3,23%	4,00%	3,53%	3,82%

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang

Meningkatnya penduduk usia kerja harus disertai dengan kualitas yang tinggi sehingga mampu menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Untuk itu perlu adanya dukungan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya saing. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Malang melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang harus mampu menjawab pelaksanaan fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas ketentuan hukum di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang wajib membuat Laporan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja, dan kegiatan Dinas dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019

Tujuan dari Laporan Kinerja ini untuk memberikan gambaran tentang:

1. Penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang.
2. Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang yang ditempatkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
3. Besaran penempatan transmigrasi dari Kabupaten Malang ke daerah transmigrasi sebagai wujud memenuhi keberhasilan program transmigrasi dalam pemerataan dan pemekaran wilayah di Indonesia.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2008 mengalami perubahan menjadi Dinas Tenaga Kerja, yang terdapat dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang terdiri atas :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.

Sekretaris terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas
- (2) Seksi Kelembagaan Pelatihan
- (3) Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Informasi Pasar Kerja
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

5. Bidang Hubungan Industrial

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, pembinaan syarat-syarat kerja dan pengupahan, serta penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan syarat-syarat kerja dan pengupahan, serta penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; Melaksanakan pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja, melaksanakan kerjasama dengan lembaga Hubungan Industrial dan instansi lain dalam pengembangan jaminan sosial pekerja/buruh, melakukan evaluasi kerjasama antar lembaga dalam pengembangan jaminan sosial pekerja/buruh, serta melakukan pembinaan kepersertaan jaminan sosial pekerja/buruh;

Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :

- (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- (2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja dan Upah
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

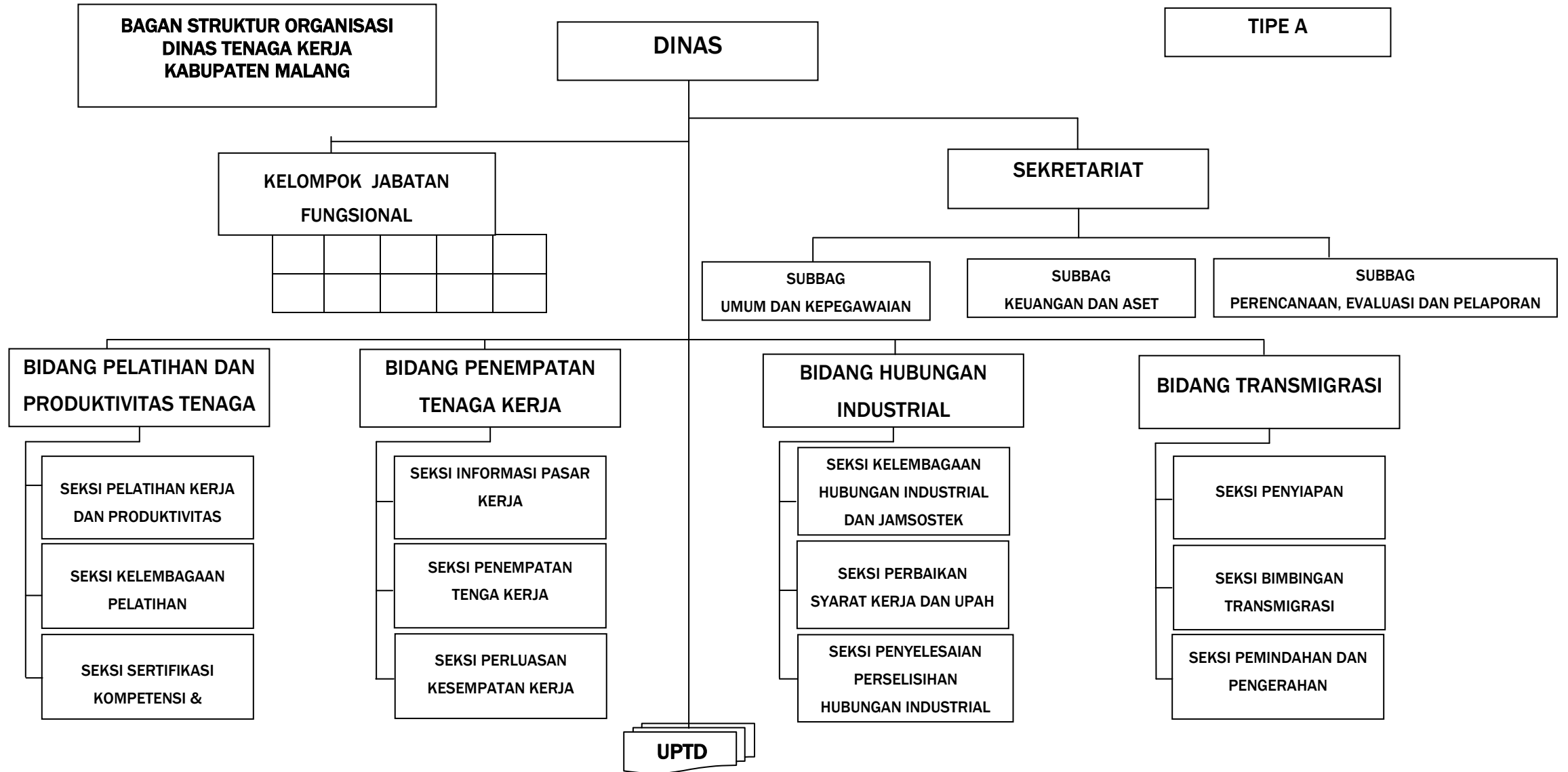
6. Bidang Transmigrasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi meliputi pelaksanaan kebijakan Pusat dan Provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian serta integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- (1) Seksi Penyiapan
- (2) Seksi Bimbingan Transmigrasi
- (3) Seksi Pemandahan dan Pengerahan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan Non PNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, secara terinci sebagai berikut :

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

S2	:	7 Orang
S1	:	28 Orang
SLTA	:	16 Orang
SLTP	:	2 Orang

B. Berdasarkan Jabatan :

Pejabat Elosen II	:	1 Orang
Pejabat Elosen III	:	5 Orang
Pejabat Elosen IV	:	15 Orang

C. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan :

Golongan IV c	:	1 Orang
Golongan IV b	:	1 Orang
Golongan IV a	:	4 Orang
Golongan III d	:	8 Orang
Golongan III c	:	7 Orang
Golongan III b	:	1 Orang
Golongan III a	:	1 Orang
Golongan II c	:	1 Orang

2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang di Tahun 2018 sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Capaian kinerja Dinas Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja	1. Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	5%	24.68%	493.55%
		2. Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	5%	0.77%	15.46%
2	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1. Persentase Upah Minimum Kabupaten Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	85%	108.71%	127.89%
		2. Persentase Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	80%	100%	125.00%
3	Terlaksananya program pelatihan dan produktivitas	Persentase lulusan yang memiliki keterampilan/kompetensi	60%	100%	166.67%
4	Terlaksananya program wilayah transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100%	100%	100.00%

Secara umum dapat dijelaskan dari 4 Sasaran Strategis dengan 6 indikator kinerja utama pada Dinas Tenaga Kerja, menunjukkan 1 indikator hasil realisasi kinerja dibawah target dan yang lainnya menunjukkan hasil melebihi target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan akan peningkatan maupun penurunan kinerja Dinas Tenaga Kerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Yang Menganggur Oleh Pasar Kerja

Pada sasaran “peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Target penempatan pencari kerja di tahun 2018 sebesar 5% tercapai 24.68% (Capaian 493.55% dengan katogeri “sangat baik”). Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 4.057 orang bertambah sebanyak 803 orang dari tahun 2017 (3.254 orang). Sehingga capaian ini ditahun ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu. Adanya peningkatan pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan kinerja secara kuantitas adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Kondisi ini dikarenakan antara lain :

- a. Peningkatan sosialisasi koordinasi pencegahan dan penanggulangan calon pekerja ke luar negeri (Calon Pekerja Migran Indonesia) di Wilayah Kabupaten Malang
- b. Peningkatan lebih ke masyarakat yang ada kecamatan-kecamatan akan pentingnya adanya pendaftaran secara resmi dan legal untuk bekerja keluar negeri

Secara umum tercapainya sasaran kinerja peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja melalui peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disebabkan oleh :

- a. Tercapainya tujuan adanya kegiatan yang dilaksanakan program perluasan dan penempatan tenaga kerja sehingga upaya pemberangkatan TKI non prosedural dapat dicegah.
- b. Tercapainya pendataan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan bagi pencari kerja sehingga mempermudah untuk melihat peluang jabatan pada perusahaan.

2. Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja

Target penyerapan tenaga kerja di tahun 2018 sebesar 5% tercapai 0.77% (Capaian 15.46% dengan katogeri “kurang”). Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 4.825 orang. Dari Data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tidak tercapai tetapi, hal ini tidak dapat diartikan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dari aspek peningkatan

penyerapan tenaga kerja dikatakan gagal. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan informasi kerja melalui fasilitasi website secara online, kegiatan Job Market Fair dan Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Bursa Kerja AKAD yang dilaksanakan oleh Seksi Informasi Pasar Kerja.

Secara umum tidak tercapainya sasaran kinerja peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja melalui peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja dikarenakan sebagai berikut :

- a. Terjadi penghitungan formulasi yang salah dalam menentukan indikator kinerja tersebut, sehingga realisasi yang ada kurang dari target.
- b. Pencarian/pengelompokan data yang berbeda ditahun ini berakibat pada angka penyerapan tenaga kerja. Dimana tahun ini tidak lagi menggunakan angka kumulatif melainkan angka pertahunnya.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Tenaga Kerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penghitungan dan pengelompokan data sesuai dengan peraturan yang ada
- b. Pola promosi pelayanan secara online untuk pemasangan lowongan dan informasi kerja serta layanan ketenagakerjaan melalui website maupun sosial media resmi dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja menjadikan lebih efisien.

2. Sasaran Terciptnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha

Pada sasaran “terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Upah Minimum Kabupaten Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini adalah 85% dengan realisasi kinerja 108.71% menunjukkan terjadinya capaian kinerja yang lebih dari 100% (Sangat Baik). Hal ini disebabkan oleh penghitungan formula kinerja yang membandingkan dengan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Malang. UMK Kabupaten Malang untuk tahun 2018 sebesar Rp. 2.574.807,00 yang

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kab/Kota Di Jatim Tahun 2018.

Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Malang diperoleh dari UMK tahun sebelumnya yaitu Rp. 2.368.510,00. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disebutkan bahwa KHL di tahun yang akan datang merujuk pada UMK di tahun sebelumnya yang dimulai tahun 2017.

Kenaikan Upah Minimum di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa secara bertahap dunia usaha di Kabupaten Malang semakin memberikan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Dengan dikeluarkannya PP No. 78 Tahun 2015 tentang upah minimum, dimana pada pasal 44 telah ditetapkan formula perhitungan upah minimum yang berlaku untuk semua daerah yang mudah dipahami baik oleh pengusaha maupun pekerja. Formula ini bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga perhitungannya dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. Kenaikan upah minimum juga bersifat proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi.

Untuk mengurangi terjadinya kegagalan dalam penyampaian penentuan UMK di Kabupaten Malang yaitu pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah).

2. Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang ada atau terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang di tahun 2017 sebanyak 19 kasus dan semua itu terselesaikan di rana Dinas Tenaga Kerja. Penyelesaian kasus yang ada sudah melalui prosedur dan peraturan yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Dari terselesaikannya kasus yang ada tingkat realisasinya mencapai angka 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 125% (sangat baik). Hal ini dikarenakan target kinerja yang ditargetkan Dinas Tenaga Kerja adalah 80%.

Meski secara umum kasus yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja terselesaikan semua tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas dalam mencapai keberhasilan indikator ini yaitu:

- a. Secara intensif mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Memberikan penghargaan kepada LKS Bipartit perusahaan yang berprestasi dalam menciptakan kondisi hubungan industrial yang kondusif ditempat kerja dan turut serta dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial adalah salah satu upaya yang diharapkan dapat mendorong iklim hubungan industrial yang kondusif di Kabupaten Malang untuk mencegah terjadinya kasus PHK di berbagai sektor lapangan usaha yang dapat menekan berkurangnya penganggur dari tenaga kerja ter-PHK.

3. Sasaran Kinerja Terlaksananya Program Pelatihan Dan Produktivitas

Indikator keberhasilan dan pencapaian sasaran kinerja ini adalah “Persentase lulusan yang memiliki keterampilan/kompetensi” realisasinya mencapai 100%. Hal ini dikarenakan peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan/kompetensi semuanya lulus walaupun belum mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebesar 324 Orang di tahun 2018.

Pelatihan tersebut terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Pelatihan Berbasis Kompetensi, berjumlah 30 Orang
- b. Pelatihan Berbasis Masyarakat, berjumlah 240 Orang
- c. Pelatihan Berbasis Kewirausahaan, berjumlah 54 Orang

Tingginya capaian kinerja Persentase lulusan yang memiliki keterampilan/kompetensi (166.67%) tersebut dikarenakan rumus untuk menentukan peserta yang dilatih lulus pelatihan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Standar Pelayanan Minimum. Perlu adanya keselarasan dalam penghitungan rumus yang ada agar memiliki peserta yang dilatih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan ditahun yang akan datang perlu adanya perbaikan dalam menentukan pencapaian indikator-indikator yang harus ada di rumus penghitungan persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi.

4. Sasaran Kinerja Terlaksananya Program Wilayah Transmigrasi

Penempatan transmigrasi pada indikator sasaran terlaksananya program wilayah transmigrasi di tahun 2018 sebanyak 1 wilayah dengan 2 Kepala Keluarga yang ditempatkan di wilayah transmigrasi yaitu di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Satai Satuan Permukiman 3 Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan kuota transmigrasi ini berkaitan dengan adanya kuota yang diterima Kabupaten Malang dari Pemerintah Pusat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Sehingga dengan kuota yang diberikan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dapat memenuhi kuota tersebut dalam artian realisasi kinerjanya 100% pada penempatan transmigrasi.

Realisasi program ini bisa menunjukkan angka 100% dikarenakan adanya dukungan kegiatan-kegiatan pada Bidang Transmigrasi yang mana terdapat kegiatan penyuluhan dan pelatihan transmigran dengan output data calon transmigran yang akan diberangkatkan ditahun yang akan datang. Sehingga bila ada kuota dari kementerian dan provinsi, Dinas Tenaga Kerja sudah siap memberangkatkan calon transmigran.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan yang ada sebagai langkah pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang, hal-hal yang perlu ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Transmigrasi untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan Disnakertrans Provinsi Jatim terkait dengan kuota yang akan didapatkan dan pembinaan terhadap calon transmigran sesuai dengan kegiatan yang ada agar mempermudah calon transmigran untuk beradaptasi di kawasan transmigrasi.

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Capaian Kinerja Tahun 2018
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian Kinerja
 - 1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

BAB II

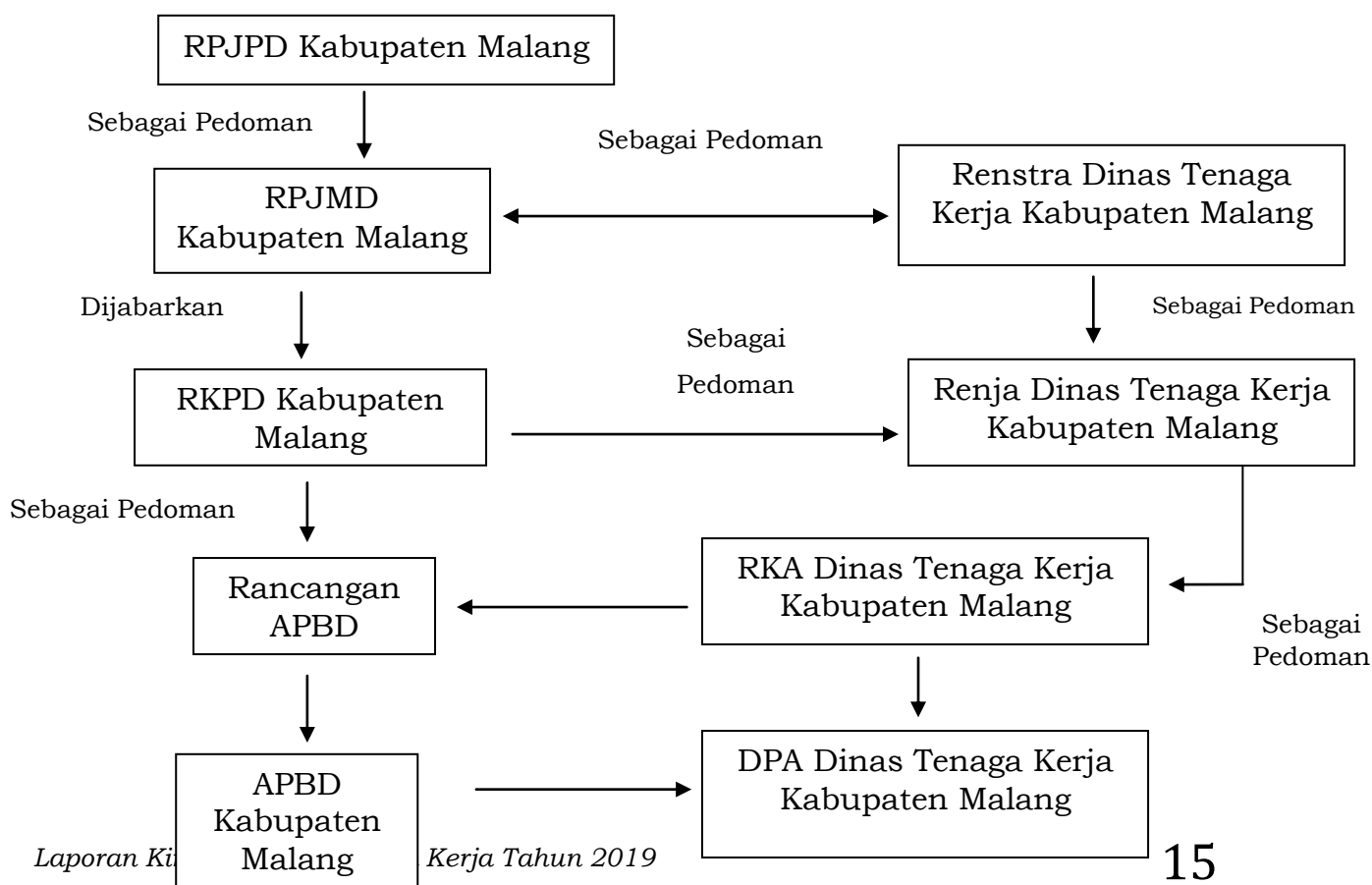
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rencana Kerja (RENJA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun (kapan harus dicapai). Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

- Idealistik : Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Abstrak : belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang menetapkan tujuan sesuai misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Malang, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja adalah :

“Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”.

Maka dari itu penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam

mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
3. Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas;
4. Terlaksananya program wilayah transmigrasi.

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Guna mencapai urusan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah membuat rencana dan program-program utama di Tahun Anggaran 2019 sebagai strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik
- 2) Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja yang Menganggur oleh Pasar Kerja
- 3) Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha
- 4) Meningkatkan Ketrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Meningkatkan Penempatan Transmigrasi

Program dan kegiatan operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;

- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;
 - l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, dengan kegiatan:
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dengan kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5. *Program Perluasan dan Penempatan Kerja* dijabarkan dengan kegiatan:
- a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
6. *Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja*, dijabarkan dengan kegiatan:
- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dengan kegiatan :
- a. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri Hasil Tembakau;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

8. *Program Pembinaan Lingkungan Sosial* dijabarkan dengan kegiatan:

- a. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja ;
- b. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah ,
- c. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

9. *Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Transmigrasi Lokal*, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
- b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM;
- c. Penyuluhan Transmigrasi Lokal;
- d. Pelatihan Transmigrasi Lokal

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 terdiri dari 3 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Secara lengkap tertuang pada table berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	4.10%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%

Berkait dengan dukungan anggaran Dinas Tenaga Kerja di Tahun 2019 belanja langsung sebesar Rp. 6.657.856.093 setelah mengalami perubahan dengan adanya PAK, bertambah menjadi Rp. 7.209.856.093

Rincian anggaran belanja langsung Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 yang dialokasikan pada tiap-tiap program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

	Program		Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.077.132.293	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	71.089.400	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	2.000.000	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	64.060.000	APBD
5.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Rp.	444.187.500	APBD
6.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Rp.	862.687.500	APBD
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.	488.699.400	APBD
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp.	2.400.000.000	DBHCHT
		Rp.	100.000.000	APBD
9.	Program Ketrasmigrasian	Rp.	700.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp.	7.209.856.093	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Program (meliputi 4 Program Rutin dan 5 Program Urusan) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah mencapai target kinerja, baik terkait urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Meski demikian masih terdapat indikator yang belum memenuhi target. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 diperoleh dari hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yang meliputi bidang yaitu :

- a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
- c. Bidang Hubungan Industrial
- d. Bidang Transmigrasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran dilakukan dengan menggunakan skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri dari kategori sebagai berikut :

NO	CAPAIAN REALISASI	KATEGORI
1	> 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

1. CAPAIAN KINERJA

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja di tahun 2019 Kabupaten Malang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10%	3,82%	100%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%	90,02%	150%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	100%

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja tahun 2019 dan 2018 Dinas Tenaga Kerja masing masing dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja	1. Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	5%	493,55%	-	-
		2. Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	5%	15,46%	-	-
2	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1. Persentase Upah Minimum Kabupaten Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	85%	127,89%	-	-
		2. Persentase Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	80%	125,00%	-	-
3	Terlaksananya program pelatihan dan produktivitas	Persentase lulusan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	60%	166,67%	-	-
4	Terlaksananya program wilayah transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100%	100,00%	-	-
5.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	4,10%	100%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-	-	60%	150%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%	100,00%	100%	100%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas tenaga Kerja Kabupten Malang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Akhir Periode Renstra
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10%	3,82%	123%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	70%	90,02%	129%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	100%

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Di tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mempunyai kinerja utama yaitu menurunkan jumlah pengangguran di desa dengan 3 indikator. Secara garis besar ke tiga indikator kinerja tersebut telah mengalami keberhasilan. Analisis penyebab keberhasilan akan kinerja Dinas Tenaga Kerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator “Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” telah tercapai 3,82% dari target 4,10% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$
$$\frac{54.106}{1.417.563} \times 100\% = 3,82\%$$

Realisasi mencapai angka 100% dikarenakan Persentase Angka Tingka Pengangguran Terbuka semakin turun realisasinya semakin bagus/tercapai. Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 3 Program dan 5 kegiatan yaitu :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

a. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Malang agar dapat meningkatkan skill yang dimiliki, kegiatan-pelatihan tersebut sebagai berikut :

- Pelatihan Membatik Bagi Pemuda Pemudi Putus Sekolah dan Pengangguran
- Pelatihan Processing Produk Pertanian (Pelatihan Mocaf)
- Pelatihan Processing Produk Pertanian
- Pelatihan Keterampilan Komputer Bagi Pencari Kerja
- Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kursus Bahasa Inggris)
- Pelatihan Keterampilan Menjahit
- Pelatihan Keterampilan Rias Pengantin Bagi Pencari Kerja

b. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui kegiatan padat karya infrastruktur yang ditujukan

untuk masyarakat Kabupaten Malang mendapatkan upah/pekerjaan sementara sebagai penopang hidupnya disaat pekerjaan utamanya tidak dapat dikerjakan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang menganggur atau masyarakat setengah menganggur

2. Program Perluasan Dan Penempatan Kerja

a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja melalui kegiatan Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Luar Negeri di Wilayah Kabupaten Malang dan Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud akan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja

a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya hak dan kewajiban dari pekerja maupun perusahaan agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

b. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial ini bertujuan meminimalisir permasalahan antar pekerja dan perusahaan serta pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing stakeholder.

Secara garis besar pencapaian kinerja Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki serta kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi untuk melatih masyarakat di Kabupaten Malang.
- Menekan terjadinya pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal agar tidak mendapatkan permasalahan dikemudian hari serta menyelesaikan permasalahan PMI yang bermasalah di luar negeri dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

- Menekan terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang terkait peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun yang akan datang untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam penurunan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka langkah-langka yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Berupaya memberikan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah Kabupaten Malang agar masyarakat dapat menciptakan usaha kecil mandiri.
- Secara intensif mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat menekan angka pengangguran.
- Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ketrampilan sesuai ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha.

2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator “Persentase Penyerapan Tenaga Kerja” telah tercapai 90,02% dari target 60% dengan realisasi 150%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\frac{3.165}{3.516} \times 100\% = 90,02\%$$

Realisasi kinerja melebihi 100% hal ini dikarenakan peningkatan target yang direncanakan untuk menempatkan pencari kerja hanya 60% diperkirakan dari tahun kemarin yang ditempatkan sebanyak 4.057 atau 84% orang dari 4.825 tenaga kerja yang terdaftar di Dinas. Program dan Kegiatan yang mendukung kinerja penyerapan tenaga kerja ini ada 2 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Lingkungan Sosial
 - a. Kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja melalui kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Bursa Kerja AKAD dan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair).

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Malang untuk mendapatkan atau mengetahui informasi lowongan kerja.

2. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, dengan adanya kegiatan ini para calon pencari kerja atau lulusan SMK-SMK di Kabupaten Malang mendapatkan pelatihan guna meningkatkan skill kemampuannya agar bisa bersaing dengan para pencari kerja dan memenuhi syarat-syarat kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Serta adanya kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lulusan dari pelatihan ini dimagangkan di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang.
- b. Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri, dengan adanya kegiatan ini Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di Kabupaten Malang mendapatkan informasi dan memahami kewajiban akan tujuan dan fungsi LPK dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat. Di Kabupaten Malang ada 27 LPK yang aktif dan bersertifikasi.

Secara garis besar pencapaian kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Para pencari kerja di Kabupaten Malang sudah mampu memenuhi standart kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan
- Adanya perluasan informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui sosial media yang dapat dijangkau lebih banyak para pencari kerja
- Adanya kerjasama dengan APINDO mempermudah para lulusan SMK di Kabupaten Malang dalam mencari tempat magang guna meningkatkan skill sebelum benar-benar terjun dalam dunia kerja

Di tahun mendatang dalam meminimalisir terjadi kegagalan pada kinerja penyerapan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mengambil langka-langka yang diperlukan adalah :

- Memberikan penekanan lebih kepada SMK-SMK di Kabupaten Malang akan pentingnya soft skill (Kemampuan) seseorang

pencari kerja agar dapat bersaing dengan pencari kerja lainnya di era Revolusi 4.0.

- Menggandeng perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang untuk memberikan peluang lebih bagi para pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Malang.
- Berupaya menciptakan suatu sistem informasi lowongan kerja yang berbasis IT.

3. Persentase Penempatan Transmigran

Indikator “Persentase Penempatan Transmigran” telah tercapai 100% dari target 100% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Transmigrasi diberangkatkan}}{\text{Jumlah transmigrasi yang Seharusnya diberangkatkan}} \times 100\%$$

$$\frac{5 \text{ Kepala Keluarga}}{5 \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\% = 90,02\%$$

Realisasi mencapai angka 100% dikarenakan Dinas Tenaga Kerja mampu memberangkatkan transmigran sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu ke Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 di Kawasan Transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam pencapaian kinerja ini didukung oleh 1 program dengan 4 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja melaksanakan penjajakan ke daerah-daerah yang bakal menjadi penempatan calon transmigran untuk mendapatkan gambaran keadaan yang ada disana.
2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM, Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan ini memfasilitasi kepada calon transmigran yang berasal dari Kabupaten Malang dalam memenuhi kebutuhan di daerah penempatan mulai dari administrasi hingga kebutuhan atau akan bekal untuk bertahan hidup serta mengembangkan potensi yang ada disana.

3. Penyuluhan Transmigrasi Lokal, kegiatan ini menjangkau animo masyarakat Kabupaten Malang untuk bertransmigrasi agar tujuan adanya Program Transmigrasi di Indonesia terlaksanakan dengan baik.
4. Pelatihan Transmigrasi Lokal, pelatihan ini diberikan kepada calon transmigran untuk mampu memanfaatkan potensi daerah disana sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan lainnya. Pelatihan yang diberikan kepada calon transmigran terutama bagi ibu-ibu yaitu pelatihan aneka kripik.

Faktor keberhasilan dari kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya target yang ditetapkan Pemerintah Pusat
- Pemberangkat transmigrasi dikarenakan keberhasilan dari kegiatan sosialisasi program transmigrasi yang tepat sasaran yaitu pinggiran daerah Kabupaten Malang.

Akan tetapi masih perlu hal-hal yang dilaksanakan ditahun mendatang agar dapat meminimalisir kegagalan yaitu :

- Terutama dalam koordinasi dengan Stakholder terkait agar pembinaan kepada masyarakat atau calon transmigran sesuai dengan keadaan dan potensi daerah transmigrasi serta agar mempermudah calon transmigran untuk beradaptasi dikawasan transmigrasi.
- Penting adanya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan hidup (Uang Saku) sementara kepada transmigran untuk menjadi modal memulai kehidupan ditempat baru sebelum bisa mandiri dalam mengelolah potensi hasil alam disana untuk biaya kehidupannya.

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan dibedakan menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan). Belanja Langsung merupakan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dan pendukung kegiatan dan program sekretariat.

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Penggunaan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang untuk mencapai pelaksanaan kegiatan dan program diperbandingkan dengan jumlah anggaran Belanja Langsung dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	3.356.875.000	46,56%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	938.699.400	13,02%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	700.000.000	9,71%

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggran Dinas Tenaga Kerja dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10%	3,82%	100%	3.356.875.000	3.016.406.800	89,86%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%	90,02%	150%	938.699.400	870.297.900	92,71%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	100%	700.000.000	637.734.900	91,10%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGAT EFISIENSI
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	100%	89,86%	41,84%
2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		150%	92,71%	12,07%	
3. Persentase Penempatan Transmigran		100%	91,10%	8,85%	

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan sebagai berikut beserta realisasinya.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Sampai Saat Ini (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.449.585.928	2.537.489.639	73,56%	912.096.289
	Belanja Pegawai	3.449.585.928	2.537.489.639	73,56%	912.096.289
	Gaji dan Tunjangan	2.514.548.250	1.710.435.377	68,02%	804.112.873
	Tambahan Penghasilan PNS	935.037.678	827.054.262	88,45%	107.983.416
B.	BELANJA LANGSUNG	7.209.856.093	6.538.041.574	90,68%	671.814.519
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.077.132.293	1.881.677.574	90,59%	195.454.719
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	100,00%	0
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.365.000	24.213.500	43,73%	31.151.500
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	734.322.380	714.568.006	97,31%	19.754.374
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.900.000	19.810.000	99,55%	90.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.855.020	58.555.020	99,49%	300.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.433.700	51.416.000	99,97%	17.700
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.221.493	3.207.848	99,58%	13.645
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.500.000	113.552.000	88,37%	14.948.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	123.760.000	93.560.000	75,60%	30.200.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	797.164.700	698.230.200	87,59%	98.934.500
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100.860.000	100.815.000	99,96%	45.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Sampai Saat Ini (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.089.400	67.511.400	94,97%	3.578.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	46.869.400	46.542.400	99,30%	327.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	24.220.000	20.969.000	86,58%	3.251.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000	2.000.000	100,00%	0
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.000.000	2.000.000	100,00%	0
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.060.000	62.413.000	97,43%	1.647.000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	61.540.000	59.893.000	97,32%	1.647.000
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.260.000	1.260.000	100,00%	0
	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.260.000	1.260.000	100,00%	0
5.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	444.187.500	417.414.300	93,97%	26.773.200
	- Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	444.187.500	417.414.300	93,97%	26.773.200
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	488.699.400	444.105.700	90,88%	44.593.700
	- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	388.699.400	386.499.400	99,43%	2.200.000
	- Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	100.000.000	57.606.300	57,61%	42.393.700
7	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	862.687.500	573.195.700	66,44%	289.491.800
	- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	357.924.000	266.071.500	74,34%	91.852.500

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Sampai Saat Ini (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	504.763.500	307.124.200	60,85%	197.639.300
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.500.000.000	2.451.989.000	98,08%	48.011.000
	- Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran	1.000.000.000	977.412.300	97,74%	22.587.700
	- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	450.000.000	426.192.200	94,71%	23.807.800
	- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	1.050.000.000	1.048.384.500	99,85%	1.615.500
9.	Program Ketrasmigrasian	700.000.000	637.734.900	91,10%	62.265.100
	- Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	143.429.000	129.247.600	90,11%	14.181.400
	- Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	298.905.400	252.901.900	84,61%	46.003.500
	- Penyuluhan Transmigrasi Lokal	206.041.000	204.500.800	99,25%	1.540.200
	- Pelatihan Transmigrasi Lokal	51.624.600	51.084.600	98,95%	540.000
	JUMLAH BELANJA	10.659.442.021	9.075.531.213	85,14%	1.583.910.808

C. PRESTASI TAHUN 2019

Daftar Perusahaan yang mendapatkan Penghargaan Program Penghargaan Zero Accident, Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penghargaan P2-HIV AIDS Tahun 2019 yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah :

Tabel 3.8
Prestasi Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	PERIODE	DISERAHKAN OLEH/PENYELENGGARA	PERUSAHAAN YANG MENERIMA	JENIS USAHA
1	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	DIVISI MUNISI - PT PINDAD (Persero)	Industri Manufaktur di Bidang Munisi
2	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT BEIERSDORF INDONESIA	Kosmetik dan Alat Kesehatan
3	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT BUMI MENARA INTERNUSA DAMPIT	Cold Storage
4	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT DUPONT INDONESIA	Industri Pembenihan Jagung & Padi Hibrida
5	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT MOLINDO INTI GAS	Kimia
6	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	Kimia
7	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT PJB UNIT PEMBANGKITAN BRANTAS	Pembangkit Listrik
8	Penghargaan Zero Accident	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT PLN (Persero) UIT JB TB UPT MALANG	Ketenagalistrikan
9	Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	Produsen Lembaran Semen Rata
10	Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PT PG RAJAWALI I UNIT PG KREBET BARU	Industri Gula dan Kristal Putih
11	Penghargaan P2-HIV AIDS	2019	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	KUD SUMBER MAKMUR UNIT MPS NGANTANG	Industri Rokok

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKj ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perjanjian Kinerja (Jakin) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja instansi termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan/kegagalan, hambatan /kendala, permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang akan diambil.

LKj Dinas Tenaga Kerja menyajikan penjelasan tujuan dan sasaran yang direalisasikan dalam anggaran tahun 2019 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terealisasi 90,59%
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terealisasi 94,97%
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi 100,00%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terealisasi 97,43%
- e. Program Perluasan dan Penempatan Kerja terealisasi 93,97%
- f. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terealisasi 90,88%
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi 66,44%
- h. Program Pembinaan Lingkungan Sosial terealisasi 98,08%
- i. Program Ketrasmigrasian terealisasi 91,10%

Dalam tahun mendatang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang akan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Dinas agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, meningkatkan pengawasan melekat meliputi pengawasan dan monitoring pelaksanaan program kerja dan meningkatkan pelaksanaan program Dinas Tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diberikan. Pada akhirnya secara keseluruhan kinerja yang terdapat dalam program kerja/kegiatan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dapat dikatakan terealisasi dengan sempurna.

**KERABADINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG**
DINAS
TENAGA KER
Drs. YOYOK WARDOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 201503 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencaker Ditempatkan th. (n) - Jumlah Pencaker Ditempatkan th. (n-1)}}{\text{Jumlah Pencaker Ditempatkan th. (n-1)}} \times 100\%$	0	5	5	5	0	0	0
2	Persentase Peningkatan Potensi Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pencaker Terdaftar th. (n) - Jumlah Pencaker Terdaftar th. (n-1)}}{\text{Jumlah Pencaker Terdaftar th. (n-1)}} \times 100\%$	0	5	5	5	0	0	0
3	Persentase Upah Minimum Terhadap Kebutuhan Hidup Layak	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten (UMK)}}{\text{Jumlah Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL)}} \times 100\%$	0	0	80	85	0	0	0
4	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus terselesaikan Tahun (n)}}{\text{Jumlah Kasus Yang Terdaftar Tahun (n)}} \times 100\%$	0	75	80	80	0	0	0
5	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Lulus Sertifikasi Kompetensi}}{\text{Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi}} \times 100\%$	0	0	55	60	0	0	0
6	Persentase Penempatan Transmigran	$\frac{\text{Jumlah Transmigran Diberangkatkan th. (n)}}{\text{Jumlah Transmigran Yang Seharusnya Diberangkatkan th. (n)}} \times 100\%$	0	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	0	0	0	0	4.10	3.60	3.10
8	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$	0	0	0	0	60	65	70

Februari 2020


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG
M. YOTOK HARDOYO, MM
 Kepala Dinas Tenaga Kerja
 NIP. 19640926 201503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. YOYOK WARDOYO, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja**

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **S A N U S I**
Jabatan : **Bupati Malang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

S A N U S I

Drs. YOYOK WARDOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	4.10%
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%
		Persentase Penempatan Transmigran	100%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.077.132.293	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 71.089.400	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.000.000	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 64.060.000	APBD
5.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Rp. 444.187.500	APBD
6.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Rp. 862.687.500	APBD
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 488.699.400	APBD
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp. 2.400.000.000	DBHCHT
		Rp. 100.000.000	APBD
9.	Program Ketrasmigrasian	Rp. 700.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 7.209.856.093	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Dinas Tenaga Kerja) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, September 2019

BUPATI MALANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

S A N U S I

Drs. YOYOK WARDOYO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640926 201503 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang**

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN				
No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Presentase angka tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,10%	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial	100%	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	265 Orang	Rp.	1.050.000.000
							Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	Rp.	1.000.000.000
				Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja	100%	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	Rp.	444.187.500
				Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 rekom	Rp.	504.736.500

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN				
No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksanannya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	Rp.	357.924.000
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial	100%	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	200 Orang	Rp.	450.000.000
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksanannya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	100%	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	18 Lembaga	Rp.	100.000.000
							Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	380 Orang	Rp.	388.699.400
		Persentase Penempatan Transmigrasi	100%	Program Ketransmigrasian	Persentase Penempatan Transmigrasi di Wilayah Transmigrasi	100%	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dg Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	3 lokasi	Rp.	143.429.000

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN				
No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	Rp.	298.905.400
							Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	680 Orang	Rp.	206.041.000
							Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	Rp.	51.624.600
JUMLAH										4.995.547.400	

Kepanjen, September 2019

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG**

Drs. YOYOK WARDOYO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 201503 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	1. Persentase Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10%	3,82%	100%
		2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	60%	90,02%	150%
		3. Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI SAMPAI SAAT INI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.077.132.293	1.881.677.574	90,59%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.089.400	67.511.400	94,97%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000	2.000.000	100,00%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.060.000	62.413.000	97,43%
5.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	444.187.500	417.414.300	93,97%
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	488.699.400	444.105.700	90,88%
7.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	862.687.500	573.195.700	66,44%
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.500.000.000	2.451.989.000	98,08%
9.	Program Ketrasmigrasian	700.000.000	637.734.900	91,10%
JUMLAH BELANJA		7.209.856.093	6.538.041.574	90,68%

Kepanjen, Februari 2020


**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG**
DINAS TENAGA KERJA
Drs. TOYOK WARDOYO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640926 201503 1 001